

**ANALISIS PERAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT INDEKS
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia)**

Tika Septiani

Universitas Swadaya Gunung Jati

tikapramana@gmail.com

Abstract: *This research is conducted to analyze the accountability of local government financial report have significant influence to level of Indonesian Governance Index (IGI). Case study on provincial government throughout Indonesia. This research uses descriptive analysis method. The data used secondary data with using the local government financial report from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is a state high institution in the Indonesian state administration system which has the authority to examine the management and responsibility of state and local finances. Hypothesis testing using t test and multiple regression analysis, obtained the form of equation $Y = 18,023 - 0,180 X_1 + 0,593 X_2 + 0,034 X_2 + e$, and coefficient of determination (R^2) equal to 76,3%. From the results of research and hypothesis testing conducted it can be concluded that accountability of local government financial statements have a significant effect on the index of good governance.*

Keywords: *Accountability, Good Government Governance*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa peran penerapan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat indeks tata kelola pemerintahan yang baik. Studi kasus pada pemerintahan provinsi se-Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data yang dilakukan, penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penulis memperoleh data penelitian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan analisis regresi berganda, diperoleh bentuk persamaan $Y = 18,023 - 0,180 X_1 + 0,593 X_2 + 0,034 X_2 + e$, dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 76,3%. Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintah yang Baik

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur segala urusan dalam daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur segala urusan dalam daerah tersebut.

Pemberian wewenang dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri ini dapat memicu penyimpangan penggunaan sumber dana untuk kepentingan pribadi.. Dalam Purnomo, dkk (2007) pemberian wewenang ini yang mendorong terjadinya *locus* korupsi di tingkat lokal dimana 'transaksi' politik banyak terjadi di gedung dewan. Praktik korupsi di daerah bahkan sudah dimulai sebelum seseorang duduk dalam jabatan kepala daerah; untuk bisa mendapat dukungan suara dari anggota DPRD, calon kepala daerah memberikan gratifikasi kepada anggota DPRD (*money politic*). Seharusnya dengan dilaksanakannya otonomi daerah juga harus dibarengi dengan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance/GGG*).

Dengan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik maka akan tercipta aparatur pemerintah yang bersih bebas korupsi, transparan dan akuntabel yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga setiap aparatur negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan kenegaraan yang mengedepankan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dan akuntabel.

Pelaksanaan otonomi daerah juga menuntut para aparatur negara untuk melaksanakan akuntabilitas di setiap pengelolaan dan penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas juga merupakan salah satu alat bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan dana otonomi daerah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Scott (1997) menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi didukung oleh transparansinya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan organisasi tersebut. Dengan demikian akuntabilitas merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah.

Akuntabilitas public dapat diukur dengan melihat akuntabilitas keuangannya (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang meliputi integritas, pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana indikator utamanya adalah laporan keuangan yang terdiri dari penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2001). Dengan demikian tingkat akuntabilitas Keuangan Pemerintah digambarkan oleh tingkat akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Pemerintah daerah tersebut. Pentingnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi di

Indonesia sesuai dengan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul “ANALISIS PERAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia)”.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi indeks tata kelola pemerintahan.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap indeks tata kelola pemerintahan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002;20) akuntabilitas publik adalah: “kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan, pertanggungjawaban, dengan melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh agent (Pemerintah Daerah) kepada masyarakat selaku pemberi amanah.”

Akuntabilitas harus dilaksanakan oleh semua entitas pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa prinsip dari akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan negara/daerah adalah kewajiban entitas peleporan (dalam hal ini Pemda) untuk memberikan tanggungjawab dengan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dibiayai dengan uang negara dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan atas kepatuhan berisi tentang daftar ketidakpatuhan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Apabila BPK tidak menemukan indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka BPK tidak akan menerbitkan laporan atas kepatuhan (Pernyataan Standar Pemeriksaan 03, Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan).

Kecukupan pengungkapan (*full disclosure*) menurut PSAP adalah “laporan keuangan yang memberi informasi pengungkapan secara rinci dan lengkap sesuai dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan.”

Pemerintah, pusat dan daerah, merupakan pihak yang memberikan informasi dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat sebagai pemberi amanah.

Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab kepada masyarakat bukan hanya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan guna mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan

Ciri-ciri pemerintah yang *accountable* adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang disajikan kepada masyarakat bersifat transparan, cepat dan tepat waktu.

- b. Masyarakat mendapatkan pelayanan prima.
- c. Setiap kebijakan publik bisa dipertanggungjawabkan secara proporsional.
- d. Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan
- e. Masyarakat dapat menilai setiap program kerja pemerintah

2.2 Tata Kelola Pemerintahan (*Good Corporate Governance* / GGG)

Menurut Ganie & Rochman (2000 : 142) *governance* diterjemahkan sebagai “suatu aktivitas yang menggabungkan pengelolaan sumber daya disektor pemerintahan dan pengelolaan sumber daya di sektor non pemerintahan”. Sedangkan Pinto dalam Nisjar (1997 : 119) mengartikan *governance* sebagai “aktivitas perwujudan wewenang pemerintahan untuk mengelola kegiatan pemerintahan dan pembanguana ekonomi”.sedangkan, LAN RI (2000) mendefinisikan *governance* sebagai “aktivitas penerapan wewenang negara dalam menyediakan *public good and service*”.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang meberikan amanat. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam penerapan good governance. Amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban yang transparan mengenai informasi keuangan dan fiskal harus relevan dan mudah dimengerti (Schiavo-Campo and Tamosi, 1999). Salah satu bentuk transparansi pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban aparatur negara dalam mengelola dana publik (public money) secara ekonomis, efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan dan kebocoran dana yang mengarah pada tindak korupsi.

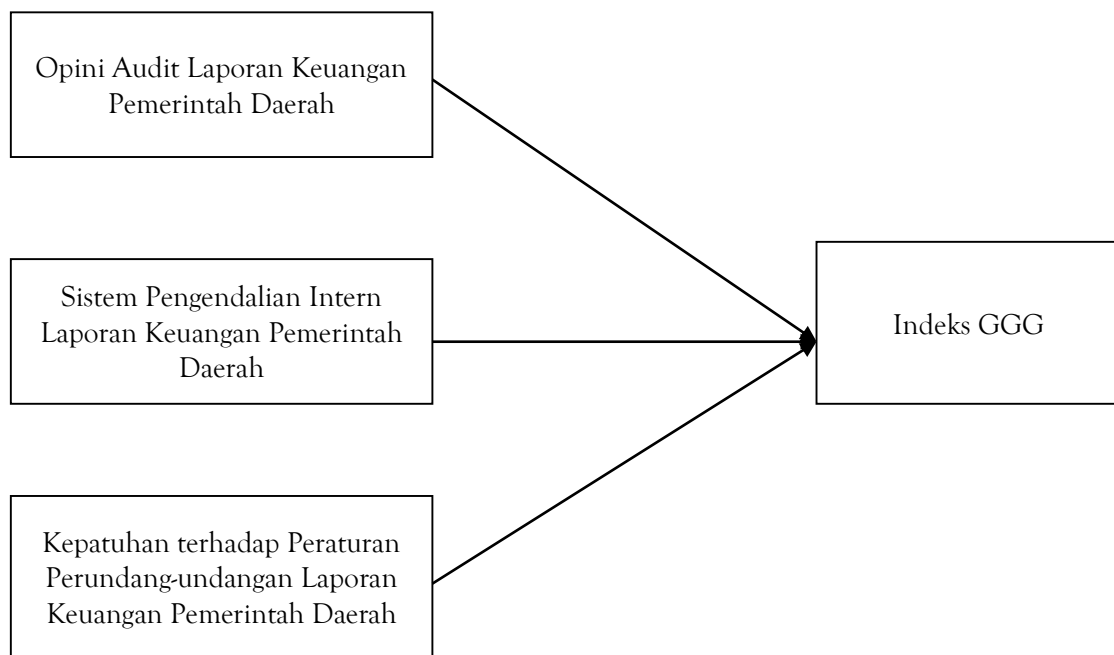
Akuntabilitas diharapkan mampu mengurangi tindak penyalahgunaan dana di pemerintah daerah. Widjajabrata dan Zacchea (2004) kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan merupakan salah satu bentuk upaya reformasi sektor publik. Reformasi sektor publik merupakan strategi dalam pemberantasan korupsi

Tingkat akuntabilitas pemerintah daerah hanya dapat diketahui dengan diadakannya pemeriksaan laporan keuangan (audit). Pemeriksaan laporan keuangan daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”.

Sejauh ini, penelitian terkait dengan penerapan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*) masih jarang dilakukan, karena kebanyakan peneliti lebih

berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Audit LKPD yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam LKPD berdasarkan prinsip (a) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, (b) pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien. Dalam proses audit selain bertanggungjawab dalam memberikan opini. BPK juga wajib memberikan laporan tentang sistem pengendalian intern, dan laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK, 2009).

Dari penjelasan diatas, opini audit yang diberikan BPK atas sistem pengendalian intern, dan laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan indikator dari akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan indeks tata kelola pemerintahan yang baik. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI

3.1 Variabel Dependen

Indeks tata kelola pemerintahan/ *Good Government Governance* merupakan indeks yang berupa skala numerik yang mengukur tingkat GGG dalam pemerintah daerah. Dalam penelitian ini indeks GGG diperoleh dari Indonesian Governance Indeks (IGI). IGI dapat dijadikan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah. Hasil dari IGI menyajikan (1) Profil kinerja tata kelola pemerintahan di masing-masing provinsi, (2) Peringkat secara keseluruhan dari semua provinsi, (3) Peringkat provinsi

berdasarkan arena tata kelola, (4) Data-data komprehensif terkait dengan isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

3.2 Variabel Independen

Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat akuntabilitas pemerintah daerah yang dilaporkan oleh BPK RI yang terdiri dari opini audit LKPD, kelemahan SPI, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Variabel dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*. Variabel dijadikan dua kategori yaitu kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), dan *non unqualified* yang terdiri dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) bernilai *dummy* 1 dan kategori *non unqualified* yang terdiri dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) bernilai *dummy* 0.

3.2.2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Variabel kelemahan SPI diukur dengan menjumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaporkan oleh BPK selama tahun periode penelitian.

3.2.3 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur dengan menghitung jumlah ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) oleh BPK.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan, catatan, kepustakaan, LHP (laporan Hasil Pemeriksaan). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini karena : (1) mudah didapat, (2) efisiensi biaya, (3) validitas sumber data terjamin karena diperoleh langsung dari BPK RI dan *Indonesian Governance Index*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tabulasi data sampel penelitian ini yaitu Pemerintahan Provinsi se-Indonesia pada tahun 2012, maka jumlah data yang dijadikan objek penelitian adalah sebanyak 33 Pemerintahan provinsi.

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel dibawah ini menyajikan hasil statistik deskriptif dari pengolahan data. Berikut merupakan gambaran suatu data yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari opini audit, SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan indeks tata kelola pemerintahan:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	32	2	5	3.34	.902	.814
LnX2	32	1.230	2.625	2.038	.317	.101
LnX3	32	1.518	2.611	2.181	.282	.080
Y	32	4.45	6.80	5.700	.588	.346
Valid N (listwise)	32					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Dari hasil penelitian Nilai K-S, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200. Nilainya diatas 0,05 hal ini berarti Variabel opini audit, SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan indeks tata kelola pemerintahan berdistribusi normal sehingga layak digunakan dalam penelitian.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Diketahui bahwa *Varian Inflation Factor* (VIF) Opini audit sebesar 2,286, SPI sebesar 1,885 dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 1,215. Setiap Variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF kurang dari 10.

Nilai tolerance Opini audit sebesar 0,437, SPI sebesar 0,531 dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sebesar 0,823. Seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan 0,1. sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen, sehingga layak digunakan penelitian.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini untuk menggunakan uji *Glejser* untuk menguji ada tidaknya kesamaan variance dari residual ke residual yang lain. Diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel independen yaitu opini audit sebesar 0,293, SPI sebesar 0,293 dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sebesar 0,793. Semua variabel mempunyai tingkat signifikan lebih besar dari 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan opini audit sebesar 29,3%, SPI sebesar 29,3% dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sebesar 79,3% tersebut tidak terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sehingga model regresi Homoskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 18,023 - 0,180 X_1 + 0,593 X_2 + 0,034 X_3 + e$$

- 1) Nilai konstanta sebesar 18,023 menunjukkan bahwa jika variabel opini audit, SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dianggap konstan maka indeks tata kelola pemerintahan adalah 18,023.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel opini audit sebesar -0,180 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya tetap dan opini audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka indeks tata kelola pemerintahan akan mengalami penurunan sebesar 0,180.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel SPI sebesar 0,593 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya tetap dan SPI mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka indeks tata kelola pemerintahan akan mengalami kenaikan sebesar 0,593.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan terhadap perundang-undangan sebesar 0,034 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya tetap dan kepatuhan terhadap perundang-undangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka indeks tata kelola pemerintahan akan mengalami kenaikan sebesar 0,034.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi diukur dengan menggunakan nilai R^2 . Diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan dari model regresi adalah 0,763. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh opini audit, SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap indeks tata kelola pemerintahan adalah 76,3% sedangkan sisanya 23,7% (100%-76,3%) dipengaruhi variabel lain.

4.5 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh Variabel independen terhadap Variabel dependen. Uji t digunakan pada sebuah penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria yang dipakai dalam uji t pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Jika $P\text{-value} < \alpha$ (0,05) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima.
- 2) Jika $P\text{-value} > \alpha$ (0,05) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau hipotesis ditolak.

Berikut penjelasan uji t yang telah dilakukan:

- 1) Didapatkan $P\text{-value}$ variabel opini audit sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H1 diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh opini audit terhadap indek tata kelola pemerintahan.
- 2) Didapatkan $p\text{-value}$ variabel SPI sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H2 diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh SPI terhadap indek tata kelola pemerintahan.
- 3) Didapatkan $P\text{-value}$ variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H3 diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap indek tata kelola pemerintahan.

5. PENUTUP

Merujuk pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas laporan keuangan daerah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting terciptanya akuntabilitas dalam Pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sarana untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas keuangan merupakan tujuan penting dari reformasi keuangan pemerintah sehingga dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Apabila dilihat dari hasil penelitian ini masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan maka peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan variabel yang lain, misalnya anggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto nico, 2007, Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Malang: Bayu Media

- Arens Alvin, 2003, Auditing, Jakarta: PT Indeks Gramedia
- Bastian Indra, 2002, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat
- Bastian Indra, 2007, Audit Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat
- Basuki, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2013. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2014. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014. Jakarta: BPK RI.
- BPK-RI, 2004, Himpunan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, Jakarta: P3KN
- BPK-RI, 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta: Pustaka Pergaulan
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nasution Anwar, 2008, Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Jakarta: Sekjen BPK-RI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan